



Perombakan Organisasi Mengerucut 10 Prioritas

YOGYA (KR) - Usulan perombakan organisasi di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akhirnya mengerucut menjadi 10 unit kerja sebagai prioritas. Sebelumnya ada puluhan usulan perombakan yang disampaikan melalui tiga raperda perihal Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Kris Sarjono Sutejo, mengungkapkan 10 unit kerja yang menjadi skala prioritas itu merupakan hasil pemetaan ulang permintaan dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta.

"Sebenarnya masih bisa berubah karena nanti tergantung dari panitia khusus (pansus) yang akan lebih mendalam melakukan pembahasan," ungkapnya, Selasa (21/4).

Beberapa unit kerja yang menjadi prioritas antara lain perubahan nomenklatur di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), penambahan urusan penanaman modal di Dinas

Perizinan, pemisahan urusan budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), perubahan Unit Layanan Pengadaan (ULP) menjadi kantor serta peleburan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) dan Bagian Humas menjadi badan.

Sementara usulan perombakan yang belum akan dibahas antara lain perubahan di Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Badan Lingkungan Hidup (BLH). "Nanti fokus di 10 prioritas itu dulu. Yang lainnya belum akan diotak-atik," imbuh Kris Sarjono.

Ketua Pansus Raperda SOTK, Bambang Anjar Jalumurti sebelumnya mengatakan, urusan yang tengah ia bahas merupakan yang paling rumit dibanding regulasi lain. Pihaknya pun perlu bersinergi dengan Komisi A yang membidangi masalah tata organisasi pemerintahan. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005